

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa kekuatan serta kesehatan lahir dan batin sehingga penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) ini dapat diselesaikan sebagai bagian dalam rangkaian pelaporan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah.

Penyampaian R-LPPD merupakan kewajiban Kepala Daerah yang didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang muatan dan sistematis pelaporannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan dalam penyusunan laporan ini demi mewujudkan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat yang adil dan prima.

Menyadari akan kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam Laporan ini, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami juga senantiasa menerima dengan tangan terbuka atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang dapat menjadi masukan bagi perbaikan ke depan. Akhirnya kami berharap semoga R-LPPD ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat di masa-masa yang akan datang.

Sekian, Wabillahi Taufik Walhidayah.
Wasalamu Alaikum Wr. Wb.

Pangkajene, Sidenreng, 29 Maret 2022
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. DOLLAH MANDO



Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Umur Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020

NO	STRUKTUR UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	0-4	13.533	12.522	26.055
2	5-9	14.673	13.832	28.505
3	10-14	14.817	13.935	28.752
4	15-19	14.980	14.153	29.133
5	20-24	14.241	13.552	27.793
6	25-29	12.180	11.512	23.692
7	30-34	11.763	11.530	23.293
8	35-39	12.281	12.147	24.428
9	40-44	11.876	11.716	23.592
10	45-49	10.421	10.948	21.369
11	50-54	9.643	10.126	19.769
12	55-59	6.817	8.141	14.958
13	60-64	5.833	6.879	12.712
14	65-69	3.754	4.671	8.425
15	70-74	3.182	4.285	7.467
16	>75	4.915	6.546	11.461
	TOTAL	164.909	166.495	331.404

Sumber: Data Disdukcapil Kab. Sidenreng Rappang, 2020.

A INDIKATOR KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,21	71,54	0,46
2	Angka Kemiskinan	5,05	5,04	0,30
3	Angka Pengangguran	5,91	4,92	16,58
4	Pertumbuhan Ekonomi	10,59	5,54	1038,98
5	Pendapatan Per Kapita	44,12	47,19	6,96
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,35	0,36	-2,58

B URUSAN WAJIB MENGENAI PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN

- > **85,30%** Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
- > **96,83%** Usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar
- > **86,70%** Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama
- > **88,26%** Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan



C HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

3,2433

SANGAT TINGGI

Sesuai Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 25 April 2020

D OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

6

KALI BERTURUT-TURUT MEMPERTAHAKAN OPINI WAJIB TANPA PENGUCALIAN (WTP) DARI BPK RI MULAI 2016 SAMPAI 2021

KESEHATAN

- > **1,20%** Rasio daya Tampung Rumah Sakit Rujukan
- > **100%** Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi
- > **92,63%** Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- > **111,80%** Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
- > **115,95%** Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- > **104,92%** Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- > **99,39%** Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar
- > **77,47%** Usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- > **51,73%** Usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- > **65,28%** Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- > **66,56%** Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- > **91,15%** ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
- > **82,23%** Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
- > **96,76%** Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar



REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

1,279 dengan realisasi **1,197** triliun

Realisasi Belanja Daerah

1 triliun dengan realisasi **936** miliar

Belanja Operasional

273 miliar dengan realisasi **259** miliar

Belanja Modal

3 miliar dengan realisasi **909** juta

Belanja Tidak Terduga

1,258 triliun dengan realisasi **1,200** triliun

Total Pendapatan Daerah

"Data hasil Audit BPK"

INOVASI DAERAH

JURUS SANG PENDEKAR

(Jaga Ibu hamil bersama bidan desa, suami dan mertua dalam penanganan Anemia/kurang zat besi)

RUMAH LANGIT Ruang Masyarakat Khusus Layanan Pendidikan Non Formal Gratis Terintegrasi

GAYA SEHATKI' Gerakan Keluarga Sayang Seribu Hari Pertama Kehidupan

WIRO SABLENG 212 Wadah Edukasi Remaja Putri Putus Sekolah Untuk Stop Hamil Usia Bella Melalui Penyuluhan Kespro Cegah Stunting

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- > **54,69%** Rasio Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota
- > **100%** Rasio Luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi, yang terlindungi oleh infrastruktur pemangant pantai di WS kewenangan kabupaten/kota
- > **58,63%** Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani jaringan irigasi
- > **91,56%** Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan 90 bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
- > **85,74%** Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
- > **100%** Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota
- > **56,17%** Tingkat kemandapan jalan kabupaten/kota
- > **100%** Rasio tenaga operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi
- > **100%** Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi



PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

- > **100%** Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- > Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
- > **35,20%** Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani
- > **6,03%** berkurangnya jumlah unit (RTLH) rumah tidak layak huni
- > **100%** Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan utilitas Umum)



TRANTIBUMLINMAS

- > **100%** Gangguan trantbum yang dapat diselesaikan
- > **100%** Persentase Perda dan Perkada yang ditegaskan
- > **57.933** jiwa Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
- > **37.610** jiwa Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- > **84.42** jiwa Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- > **100%** Persentase pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran
- > **6,63** menit Menit waktu tanggap (Respon Time) penanganan kebakaran

SOSIAL

- > **100%** Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pantai (indikator SPM)
- > **100%** Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

